

ABSTRAK

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan hibah tanah untuk konstruksi sarana air minum yang dibuat di bawah tangan serta bagaimana keabsahan dari perjanjian hibah di bawah tangan yang terjadi dalam pelaksanaan hibah di bawah tangan pada program pamsimas Tujuan adanya penelitian ini adalah guna menjelaskan pelaksanaan hibah yang terjadi dilapangan pada program pamsimas,serta mengetahui bagaimana keabsahan hukum atas hibah tanah yang dilakukan di bawah tangan. Penulisan skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dengan adanya program Pamsimas yang diadakan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi sarana air bersih bagi masyarakat dibutuhkan lahan dalam mendukung pembangunan konstruksi,sehingga masyarakat harus berkontribusi dalam bentuk menghibahkan lahannya kepada pemerintah daerah sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksanakannya program pamsimas. Penelitian ini dilakukan di 3 Provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Jambi.Hibah memiliki pengertian yaitu salah satu dari bentuk peralihan hak milik yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian hibah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata adalah Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya menyerahkan suatu benda dari kepemilikannya secara sukarela tanpa adanya paksaan ataupun kompensasi, dan dengan tidak dapat ditarik Kembali dikemudian hari, Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan masyarakat desa dalam program Pamsimas dengan cara membuat pernyataan hibah di bawah tangan yang berarti dilakukannya tanpa dibuat akta PPAT dan hibah lahan yang diberikan rata-rata tidak memiliki sertifikat tanah atau belum terdaftar di pencatata Badan Pertanahan Nasional,serta bagaimana keabsahannya. Hal itu terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman hukum tentang prosedur hibah tanah sesuai perundang-undangan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa yang melakukan hibah tanah di bawah tangan tanpa dilakukan dihadapan PPAT,penyebab lainnya adalah kurangnya biaya untuk membuat akta PPAT. Penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami apa itu hibah serta mendaftarkan tanahnya pada masa satu tahun sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan. Selain itu keabsahan mengenai surat hibah yang dilaksanakan adalah tidak sah karena Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berisi bahwa tiap pemberi Hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika Hibah berupa tanah tidak dibuat oleh Notaris, maka tidak akan memiliki Kekuatan Hukum.

Kata Kunci: *Hibah Tanah, Sarana Air Minum, Perjanjian Di Bawah Tangan*

ABSTRACT

In this study, we will discuss the implementation of land grants for the construction of drinking water facilities that are made under the hands and how the validity of the underhand grant agreement that occurs in the implementation of underhanded grants in the PAMSIMAS program. in the field in the PAMSIMAS program, as well as knowing how the legal validity of land grants carried out under the hands. The writing of this thesis was made using empirical juridical research methods. With the Pamsimas program held by the government which aims to provide clean water facilities for the community, land is needed to support construction development, so that the community must contribute in the form of donating their land to local governments as a condition that must be met for the implementation of the PAMSIMAS program. This research was conducted in 3 provinces, namely Riau Province, Bangka Belitung Province, and Jambi Province. The definition of a grant as explained in the provisions of Article 1666 of the Civil Code is an agreement whereby the donor in his lifetime surrenders an object from his ownership voluntarily without any coercion or compensation, and irrevocably in the future. Based on the results of the research, problems can be obtained. in this study is the implementation of grants by village communities in the Pamsimas program by making a grant statement under the hand which means it is done without a PPAT deed and the land grants given on average do not have a land certificate or have not been registered with the registrar of the National Land Agency, and how valid it is. This happened due to a lack of legal understanding of the procedure for land grants in accordance with the legislation and it has become a habit for village communities to carry out land grants under their hands without being carried out before the PPAT, another reason is the lack of costs for making the PPAT deed. The solution to this problem is to provide socialization to the community to understand what a grant is and register the land one year before the construction is carried out. In addition, the validity of the grant letter implemented is invalid because Government Regulation No. 24 of 1997 concerning land registration contains that each grantor of land and building grants must be carried out with a Land Deed Official Deed (PPAT). If the grant in the form of land is not made by a notary, it will not have legal force.

Keywords: Land Grants, Drinking Water Facilities, Underhand Agreement